E- ISSN : 3021-7628

JURNAL HAK
KAJIAN HUKUM ADMINISTRASI & KOMUNIKASI

Refleksi Kerja Sama Amerika Serikat-ASEAN Di Masa Kepemerintahan Presiden Donald Trump dalam Menanggulangi Pandemi COVID-19

Muhammad Iqbal Yunazwardi [1*]

1 Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Indralaya, Universitas Sriwijaya

* Corresponding Author: muhammadiqbal_unazwardi@fisip.unsri.ac.id

ABSTRACT

The COVID-19 pandemic has urged all countries to work optimally to minimize the resulting negative impacts. Cooperation is an unavoidable effort to create maximum efforts in handling COVID-19 because no single country can solve the COVID-19 problem independently. This paper discusses how to reflect on the cooperation carried out by the United States (US) and ASEAN to solve the COVID-19 pandemic. As a major power, the US has always played an essential role in global interactions, especially in times of crisis. However, under the Trump administration, bilateral and multilateral approaches to cooperation will face challenges. As an anti-globalist, Trump will try his best to calculate the benefits that the US gets in every form of cooperation. By using a transactional bilateralism approach, this paper explains how the motive for cooperation can occur in terms of US domestic factors in handling COVID-19, the Trump administration's rational calculations, to the strategic opportunities that the US can capitalize on its cooperation with ASEAN to resolve the problem.

Keywords: *Transactional Bilateralism, Trump's Administration, Cooperation, Covid-19 Pandemic, Multilateralism*

ABSTRAK

Pandemi COVID-19 telah membuat seluruh negara di dunia harus bekerja secara maksimal untuk meminimalisir dampak negatif yang dihasilkan. Untuk menciptakan upaya maksimal dalam penanganan COVID-19, maka kerja sama adalah upaya tidak bisa lagi dielakkan karena tidak ada satu negara pun yang bisa menyelesaikan masalah COVID-19 secara mandiri. Tulisan ini membahas bagaimana refleksi atas kerja sama dilakukan oleh Amerika Serikat (AS) dan ASEAN dalam menyelesaikan masalah pandemi COVID-19. Sebagai sebuah kekuatan besar, peran AS selalu mengambil bagian penting dalam interaksi global, terutama di masa krisis. Akan tetapi di bawah administrasi Trump, pendekatan kerja sama bilateral maupun multilateral akan mendapatkan tantangan tersendiri. Sebagai seorang anti globalis, Trump akan berusaha semaksimal mungkin mengkalkulasikan keuntungan yang didapat AS dalam setiap bentuk kerja sama. Dengan menggunakan pendekatan transactional bilateralism, tulisan ini menjelaskan bagaimanakah motif kerja sama dapat terjadi dilihat dari faktor domestik AS dalam penanganan COVID-19, perhitungan rasional administrasi Trump, hingga peluang strategis yang dapat dikapitalisasi oleh AS atas kerjasamanya dengan ASEAN dalam upaya untuk menyelesaikan masalah pandemi COVID-19.

Kata Kunci: Transactional Bilateralism, Administrasi Trump, Kerja Sama, Pandemi COVID-19, Multilateralisme

This is an open-access article under the CC BY license.

DOI:
https://doi.org/10.30656/jhak.v2i1.10486

1. PENDAHULUAN

Kerja sama internasional adalah faktor yang penting dalam mengelola permasalahan pandemi COVID-19. Penyebaran wabah secara global telah membuktikan bahwa sangat sedikit kesempatan bagi suatu negara maupun organisasi regional untuk bisa menyelesaikan masalah secara sendiri-sendiri, tak terkecuali ASEAN. Sebagai organisasi regional, ASEAN dianggap sebagai wadah penting bagi negara-negara ASEAN untuk bekerja sama. Upaya kerja sama juga tidak terbatas kepada negara anggota. Akan tetapi, mitra utama ASEAN juga berperan penting. Sebagai mitra utama yang memiliki kapabilitas politik, ekonomi, dan sosial yang cukup kuat, Amerika Serikat (AS) memiliki potensi peran yang cukup vital untuk membangun kerja sama dengan ASEAN. Sebagai kekuatan global, negara adikuasa, dan pasar terbesar dunia, AS secara otomatis memiliki peran yang vital dalam hubungannya dengan negara-negara ASEAN. Akan tetapi, terdapat tantangan-tangan dalam kerja sama tersebut. AS mengalami posisi yang cukup sulit dalam menghadapi pandemi COVID-19. Berdasarkan data terakhir yang penulis ambil pada tanggal 8 Agustus 2020, AS menjadi negara terdampak dengan total kasus sebesar lima juta dan total kematian sebesar 164 ribu lebih korban jiwa (Worldometers, 2020). Jumlah korban dianggap akan terus bertambah seiring beberapa faktor. Menurut Stiglitz (2020), AS memiliki berbagai hambatan dalam mengatasi COVID-19 yang menciptakan krisis. Dalam pemerintahan Trump, pemerintah dianggap gagal untuk membangun konektivitas antara aktor negara, peneliti, maupun gerakan masyarakat sipil . Selain itu, Stiglitz juga mencatat beberapa masalah dalam transparansi pemerintah. Permasalahan yang dihadapi AS terjadi seiring dengan sikap Trump untuk melepaskan tanggung jawab negara dalam membangun sistem kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, sistem proteksi kesehatan AS dianggap lemah. Kelemahan ini berdampak pada rendahnya tingkat hidup, kurangnya level pengelolaan asuransi kesehatan, hingga kekurangan tempat tidur untuk perawatan di rumah sakit.

Di awal masa pemerintahannya, Trump sama sekali tidak memfokuskan kebijakannya kepada sistem kesehatan nasional dengan tidak ada penugasan khusus terhadap badan keamanan kesehatan global di dalam *National Security Council (*NSC) (Stiglitz, 2020). Bahkan lembaga tersebut telah dihapuskan pada bulan Mei 2019. Kesiapan AS untuk menghadapi ancaman COVID-19 pada masa pemerintah Trump terasa lebih berat akibat kebijakan pemotongan anggaran yang dilakukan terhadap biaya proteksi kesehatan masyarakat. Selain itu, pemerintah Trump juga telah memotong anggaran secara drastis terhadap institusi kesehatan *Centers for Disease Control and Prevention* (CDC). Upaya ini membuat institusi tersebut mengurangi atau menghentikan upaya pencegahan epidemi di 39 dari 49 negara yang telah dibantu. Bahkan pada penyesuaian anggaran tahun 2020, pemerintahan Trump mengusulkan lagi pengurangan anggaran sebesar 10% pendanaan CDC (Forbes, 2020). Biaya yang dianggarkan untuk CDC sebesar 750 juta dolar hanya akan digunakan untuk pengembangan epidemiologi dan kapasitas laboratorium di tingkat negara bagian dan lokal.

Di sisi lain, negara-negara di ASEAN juga memiliki masalah tersendiri dalam penanggulangan COVID-19. Filipina dan Indonesia menjadi 10 besar negara terdampak COVID-19 terbesar di Asia. Filipina memiliki total kasus 126 ribu orang terinfeksi COVID-19 dan total kematian 2.209 korban jiwa. Indonesia memiliki angka yang lebih parah. Walau total kasusnya di bawah Filipina dengan 123 ribu kasus, tetapi tingkat kematian mencapai 5.658 korban jiwa. Akan tetapi tidak sedikit pula negara ASEAN yang sukses mengendalikan pandemi. Vietnam dan Singapura berhasil menghindari total kematian besar dengan upaya maksimal negara dalam pelacakan, perawatan dan

aturan-aturan ketat pembatasan sosial. Dalam melihat kondisi kedua aktor tersebut, lalu bagaimanakah potensi tantangan kerja sama yang bisa dibangun antara AS dan ASEAN dalam upaya untuk menanggulangi penyebaran Covid-19? Pertanyaan tersebut akan dijawab melalui kajian yang mendalam mengenai pola, tantangan dan motif yang dibangun kedua aktor dalam merespon pandemi. Kemudian, artikel ini akan menjelaskan bagaimanakah potensi kerja sama yang bisa dihasilkan oleh kedua aktor tersebut dalam menanggulangi pandemik COVID-19.

Pemilihan ASEAN sebagai fokus studi tidak terlepas dari betapa potensialnya regional ini. Menurut Chong, Li & Yip (2020), ASEAN. berkontribusi pada proporsi output ekonomi global yang tidak bisa diremehkan. Berdasarkan data International Monetary Fund (IMF), jumlah PDB negara-negara ASEAN pada tahun 2019 mencapai 9,34 milliar dolar AS. Angka ini menjadi ekonomi terbesar keempat setelah China, AS, dan India. Selain itu, ASEAN memiliki ketergantungan yang kuat dalam bidang perdagangan dengan China dan Amerika Serikat, dimana kedua negara tersebut memberikan pengaruh kerentanan ekonomi apabila hubungan tersebut terdampak oleh fokus masing-masing pihak dalam menyelesaikan pandemi.

Terdapat dua pemikiran besar terkait potensi kerja sama dalam masa pandemi COVID-19. Pertama, terdapat asumsi yang menyatakan bahwa solidaritas dalam multilateralis harus dilakukan karena tidak ada satupun negara yang dapat menyelesaikan masalah yang bersifat transnasional. Secara historis pula, pengendalian penyakit menular selalu terkait dengan bentuk kerja sama internasional. Menurut Kayo (2020), endemi maupun pandemi tidak lagi berkaitan dengan krisis kesehatan masyarakat, namun juga krisis global yang dapat melumpuhkan perekonomian, pembangunan dan pertahanan setiap negara di dunia. Kayo mengidentifikasi masalah ini dengan memaparkan kurangnya solidaritas global, kondisi struktural, hingga lemahnya mekanisme koordinasi untuk menangani pandemi sebagai krisis global.

Menurut Sachs (2020), dunia mencapai momen Kindleberger sehingga tidak akan ada satu kepimpinan global yang dapat memberikan solusi bersama. Begitupun tidak ada satu negara pun atau aliansi yang bersedia atau mampu menyediakan barang publik global. Dengan munculnya COVID-19, maka tercipta sebuah bencana global tanpa kekuatan hegemonik. Perlu diperhatikan, hal ini berdampak pada kerja sama global yang melemah. Dalam penelitiannya, Sachs (2020) mencontohkan administrasi Trump berusaha untuk terus menyalahkan China atas dampak pandemi COVID-19 tanpa melihat fakta bahwa dampak penyakit dapat bersifat lintas batas negara dan mencegahnya adalah sebuah keniscayaan.

Argumen Sachs (2020) dapat dikonfirmasi sebagai bentuk bahaya dari kepemimpinan neoliberal otoritarian yang dapat mengganggu jalannya multilateralisme. Menurut Ortega & Orsini. (2020), kepemimpinan otoritarianisme neoliberal sebuah negara dapat menjadi malapetaka bagi dunia. Tidak hanya dalam kegagalan membangun kerja sama internasional dalam penyelesaian pandemi COVID-19, namun juga kegagalan negara itu sendiri. Ortega & Orsini (2020) dalam penelitiannya terhadap kepemimpinan Presiden Brazil Jair Bolsonaro menyatakan bahwa kepemimpinan otoritarianisme berdampak pada runtuhnya keberpihakan pada sains, lemahnya tata kelola kesehatan masyarakat, dan dukungan terhadap solidaritas masyarakat sipil. Kepemimpinan

ini sering kali diidentifikasi sebagai bentuk neoliberal otoritarianisme yang serupa terjadi juga di AS (Presiden Donald Trump) dan Filipina (Presiden Rodrigo Duterte) (Hendrawan, Atmojo & Pratama, 2020). Brazil sendiri tercatat menjadi negara dengan kematian terbesar kedua setelah AS per Mei 2022, yaitu sebanyak 664.564 jiwa meninggal. Sedangkan jumlah kematian terbanyak akibat pandemi COVID-19 yaitu AS, sebanyak 1.025.764 jiwa.

Kedua, pandemi COVID-19 telah menciptakan backlash dari globalisasi, yaitu negara memiliki sikap untuk meningkatkan sentimen nasionalisme sebagai bentuk pencegahan atas penyebaran COVID-19 yang bersifat lintas negara. Menurut Permal (2021), upaya negara dan sektor swasta di seluruh dunia yang bertujuan untuk membangkitkan kembali ekonomi global terganggu karena kondisi tiap negara yang bersifat nasionalistik. Permal (2021) mendefinisikan kondisi ini sebagai bentuk deglobalisasi akibat pandemi. Asumsi yang dibangun yaitu: (1) ekonomi global semakin mengadopsi perspektif nasionalistik dengan fokus pada lokalisasi produksi barang dan jasa; (2) dunia kurang terbuka akibat pembatasan perjalanan; dan (3) penurunan kesejahteraan masyarakat dunia akibat pandemi.

Hal ini tentu akan menjadi problem sendiri bagi ASEAN. Dalam penelitian Jurgen Rulland (2021), penyelesaian masalah COVID-19 tetap bergantung norma-norma kerja sama yang mengakar yang didasarkan pada norma-norma kedaulatan dan antarpemerintah. Hal ini berdampak pada dalam pengelolaan krisis kesehatan regional yang sederhana, karena mekanisme yang ada dibuat terfragmentasi dan bergantung pada pendanaan donor dan dengan kapasitas yang terbatas (Ramasamy and He 2020; Chong and Kliem 2020). Jika berasumsi sekalipun bahwa AS menjunjung tinggi semangat multikulturalisme, tetap saja norma-norma yang mengakar melalui ASEAN Way membuat segala bentuk penetrasi kekuatan (aktor politik) besar dalam mengatasi permasalahan global dan lintas batas negara tidak berjalan maksimal (Rulland, 2021; Rachmat, 2020).

Penelitian ini berasumsi bahwa pemimpin dengan watak anti globalis tidak hanya sulit menyelesaikan masalah pandemi di negaranya, tetapi juga sulit untuk membangun kerangka kerja sama dalam penanganan COVID-19. Dalam kepemimpinannya, Trump melihat segala bentuk kerja sama dalam sisi yang cukup pragmatis, yaitu melihat bagaimana kepentingan perimbangan kekuatan dan pengaruh AS terhadap China di Asia Tenggara.

2. KERANGKA KONSEPTUAL

2.1. Transactional Bilateralism

Dalam tulisan arus utama kerjasama internasional, Robert Keohane dan Joseph Nye dari perspektif neoliberal institusionalisme menyatakan bahwa ancaman terhadap negara pada akhirnya menciptakan tuntutan kuat untuk kerja sama karena mereka tidak dapat menyelesaikan masalahnya sendiri (Busby, 2020). Upaya kerja sama juga didukung oleh kondisi dunia yang semakin multipolar, di mana kesejahteraan dan kekuasaan akan didistribusikan diantara lebih banyak aktor (Laidi, 2018). Oleh karena itu menurut Laidi (2018), setiap negara seharusnya berharap bahwa multi lateralisme (yang dipahami sebagai regulasi normatif HI melalui lembaga internasional yang sah) akan muncul sebagai bentuk yang paling efektif.

Namun yang terjadi adalah sebaliknya, multipolaritas menciptakan paradoks yang anyar, yaitu pengurangan multilateralisme. Gelombang besar terhadap kekecewaaan dampak globalisasi telah membuat berbagai pimpinan negara mengkalkulasikan kembali manfaat dan dampak positif apabila ia turut aktif dalam kerja sama internasional, tidak hanya multilateral semata, tetapi juga bilateral. Logika kerja sama sejatinya telah memberikan celah besar yang diprediksi akan mengganggu kestabilan hubungan antar aktor. Menurut Olson (1971), peningkatan jumlah aktor dalam kerja sama tidak serta merta menghasilkan solusi bersama kecuali ada insentif atau cara paksaan untuk meyakinkan aktor agar mematuhi aturan main. Lebih lanjut, Olson menekankan bahwa ada peluang bahwa tiap aktor akan menjadi "*free rider*", yaitu terdapat aktor yang diuntungkan tanpa harus susah payah mengeluarkan tenaga di dalam kesepakatan. Menurut Laidi (2018), seringkali Trump selalu menggunakan kata "*free rider*" untuk menghukum sekutunya. Kata-kata tersebut seringkali digunakan Trump untuk memperlihatkan bahwa ada yang salah dalam berbagai perjanjian multilateralisme yang telah disepakati oleh AS. Laidi menganggap bahwa keinginan Trump untuk meninggalkan multilateralisme sangat dipengaruhi oleh kegagalan AS di masa pemerintahan presiden Obama yang gagal menjungkalkan China saat bernegosiasi di dalam TIPP.

Oleh karena itu, logika kerja sama dalam penanganan COVID-19 harus diarahkan seutuhnya pada bentuk bilateralisme atau kerja sama yang merangkul dua aktor. Dalam perspektif yang Trump pahami, Stokes (2018) menjelaskan apa yang dimaksud oleh *transactional bilateralism*. Stokes menggambarkan istilah *transactional bilateralism* dan tiga alasan utama. Pertama, logika bilateral Trump akan selalu menggunakan motif "American First"(Putri & Rivai, 2019). Kedua, walau mengalami penurunan pengaruh, AS tetap menjadi negara hegemon yang diuntungkan secara struktural di sejumlah bidang yang sangat penting. Ketiga, Stokes berpandangan bahwa keunggulan geopolitik tetap akan dimanfaatkan investor AS untuk membentuk kembali dunia dengan cara yang menguntungkan kepentingan AS. Sederhananya, *transactional bilateralism* adalah logika biaya-manfaat dalam sebuah kerja sama. Dalam pemerintahan Trump, logika ini melawan arah kebijakan luar negeri AS yang selalu mengutamakan nilai-nilai demokrasi atau HAM. Oleh karena itu, hubungan bilateral ini akan lebih tertarik untuk membangun secara dua arah berdasarkan perhitungan rasional yang tentunya disesuaikan dengan manfaat dari kepentingan politik dan ekonomi yang dirasakan oleh AS.

3. METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan metode kualitatif untuk melihat lebih jauh bagaimana relasi antar kedua aktor yaitu ASEAN sebagai sebuah regionalisme dan Amerika Serikat sebagai sebuah negara. Metode ini berusaha untuk mendeskripsikan, menginterpretasikan, dan mengkontekstualisasikan sebuah isu (Klotz, 2008; Neuman, 2015). Kerja sama penanggulangan COVID-19 antara ASEAN dan Amerika Serikat dilakukan pada kurun waktu tahun 2020 (awal fase pertama pandemi COVID-19) hingga ketika berakhirnya jabatan Donald Trump pada awal tahun 2021. Pembatasan penelitian ini menurut Neuman (2015) penting, tidak hanya untuk menyeleksi sebuah topik, tetapi juga menyusun batasan-batasan spesifik kurun waktu agar konteks mendasar penelitian tidak berpengaruh,

https://doi.org/10.30656/jhak.v2i1.10486
EISSN: 3021-7628

terutama terkait dinamika politik sebuah lokus yang sangat besar. Penelitian ini memiliki beberapa langkah, penulis akan menganalisis bagaimana kedua aktor di atas merespon fenomena pandemi COVID-19 yang dilanjutkan dengan respon kerjasama kedua negara dalam mengatasi dampak dari penyebaran virus COVID-19. Kedua, penelitian ini berusaha untuk menjelaskan bagaimana terjadi anomali. Anomali ini dilihat dari posisi Amerika Serikat dibawah pemerintahan Presiden Trump yang lemah terhadap pendekatan multilateralisme, disaat penyelesaian pandemi membutuhkan kerja keras aktor dalam kerangka multilateralisme. Ketiga, peneliti berusaha untuk merefleksikan bagaimana kedua aktor di atas membangun kerangka kerja sama dalam penanggulangan pandemi COVID-19.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hubungan AS-ASEAN dalam Menanggulangi Pandemik COVID-19

Opsi kerja sama menjadi bagian penting yang harus dilakukan ASEAN untuk menanggulangi pandemik COVID-19. Sesuai dengan Poin 15, Pasal 1 Piagam ASEAN (ASEAN, 2007), negara-negara anggota ASEAN berkomitmen untuk mempertahankan sentralitas dan peran proaktif ASEAN sebagai kekuatan penggerak utama dalam hubungan dan kerja samanya dengan para mitra eksternal dalam arsitektur kawasan yang terbuka, transparan, dan inklusif. Upaya tersebut dilakukan, salah satunya dengan membangun kerja sama kesehatan dengan mitra penting ASEAN, yaitu AS. Data terakhir yang bisa dilihat untuk menggambarkan hubungan AS-ASEAN dalam menghadapi COVID-19 adalah Joint Statement Special Video Conference Of Health Ministers Of Asean And The United States In Enhancing Cooperation pada tanggal 30 April 2020. Pernyataan bersama tersebut dibuat atas sadarnya kedua pihak akan pentingnya membangun kerja sama internasional untuk memerangi pandemik COVID-19 yang disetujui oleh seluruh Menteri Kesehatan ASEAN dan AS. Dalam pernyataan bersama tersebut, terdapat 10 poin yang disepakati oleh Menteri Kesehatan ASEAN maupun AS. Kesepakatan tersebut antara lain (ASEAN, 2020a); (1) berbagi informasi mengenai aspek media COVID-19; (2) meningkatkan kerja sama pengembangan SDM medis; (3) kerja sama bantuan teknis, terutama dalam hal produksi vaksin dan memastikan akses yang adil terhadap vaksin dan obat-obatan antivirus; (4) memperkuat upaya kolektif menjaga aliran barang-barang medis; (5) merencanakan pembentukan dana respon COVID-19; (6) menguatkan komitmen AS untuk memberikan bantuan kesehatan publik internasional; (7) mendukung mekanisme regional yang dibentuk oleh kerja sama kesehatan ASEAN (8) berkomitmen untuk bekerja erat dengan organisasi multilateral dan komunitas internasional; (9) berkomitmen untuk berinvestasi dalam Universal Health Coverage; dan (10) berkeinginan untuk membangun kerja sama yang lebih melibatkan jaringan dan platform yang disediakan oleh Sektor Kesehatan ASEAN serta mekanisme peraturan kesehatan internasional.

AS telah memberikan total 18,3 juta dolar untuk darurat kesehatan dan bantuan kemanusiaan terhadap anggota negara ASEAN. Secara global per 26 Maret 2020, AS menyediakan investasi awal sebesar 247 juta dolar AS dalam bentuk kesehatan darurat dan bantuan kemanusiaan untuk membantu negara-negara yang membutuhkan (US Mission to ASEAN, 2020). Selain dana, AS juga telah memberikan bantuan kepada organisasi multilateral seperti organisasi kesehatan dunia. Selain itu melalui USAID, AS telah menganggarkan total 110 juta dolar yang disediakan untuk 64 negara paling berisiko menghadapi ancaman dari pandemi global, 64 juta dolar diantaranya diberikan melalui Badan Pengungsi PBB (UNHCR) (US Mission to ASEAN, 2020).

Pembiayaan AS terhadap negara ASEAN untuk menanggulangi COVID-19 berupa (US Mission to ASEAN, 2020): (1) penyiapan laboratorium skala besar untuk menguji COVID-19; (2) pencegahan dan pengendalian infeksi; (3) mengaktifkan komunikasi resiko; (3) menerapkan rencana darurat kesehatan masyarakat untuk titik masuk perbatasan negara-negara ASEAN; (4) mengaktifkan penemuan kasus dan pengawasan berbasis kejadian untuk penyakit influenza serupa; (5) melatih dan melengkapi secara cepat responden dalam penyelidikan dan penelusuran kontak; (6) dan memperbarui materi pelatihan untuk petugas kesehatan. Secara umum, kerja sama ASEAN-AS dalam kondisi COVID-19 ialah memperkuat program keahlian profesional medis Asia Tenggara. AS telah mengirimkan 1.400 dokter dari negara-negara ASEAN untuk mendapatkan informasi mengenai COVID-19 dari universitas kedokteran di AS. Secara regional, AS melalui National Institute of Health (NIH) aktif mendukung penelitian di negara-negara ASEAN dalam melawan pandemi, termasuk vaksin, terapi dan penanggulangan medis. Selain itu melalui CDC dan USAID, AS meningkatkan kapasitas negara ASEAN untuk bersiap menghadapi wabah dan membangun kemampuan diagnostik laboratorium (US Mission to ASEAN, 2020).

AS juga telah membangun hubungan dengan negara-negara ASEAN terkait penanggulangan COVID-19. Dengan Brunei Darussalam, Departemen Luar Negeri AS akan mengirimkan respirator dan alat pelindung diri (APD) setelah tuntutan domestik AS dipenuhi. Untuk Kamboja, AS telah memberikan 2 juta dolar untuk bantuan kesehatan yang dipergunakan bagi pemerintah Kamboja untuk menyiapkan sistem laboratorium dan mendung pakar teknis untuk respons dan kesiapsiagaan (US Mission to ASEAN, 2020). Selain itu, CDC juga membantu Kamboja untuk melakukan pelacakan korban terdampak dan pengendalian infeksi. Dengan Indonesia, AS merencanakan pemberian bantuan 2,3 juta dolar dalam bentuk bantuan kesehatan untuk menyiapkan sistem laboratorium. Di Laos, AS mengirimkan tenaga teknis CDC untuk memberikan pelatihan epidemiologi, pengawasan, dan laboratorium. Selain itu, Badan Pengurangan Ancaman Pertahanan (DTRA) AS memberikan rancangan program Pengurangan Ancaman Biologis untuk mendukung kapasitas Kementerian Kesehatan Laos (US Mission to ASEAN, 2020). Pada dua bulan terakhir, AS telah memberikan total pendanaan kepada Laos sebesar 2 juta. Di Malaysia, Departemen Luar Negeri AS berjanji akan memasok ventilator setelah permintaan domestik AS dipenuhi. Selain itu AS juga membantu kerja sama pengujian antigen dan pelatihan pengembangan vaksin (US Mission to ASEAN, 2020). Untuk Myanmar, AS memberikan bantuan sebesar 3,8 juta dolar AS untuk pendanaan kesehatan dan kemanusiaan saat pandemik COVID-19. Sebagai negara yang memiliki hubungan yang erat, AS menyiapkan total bantuan 4 juta dolar kepada pemerintah Filipina untuk menyiapkan sistem laboratorium dan tracing pasien COVID-19 (US Mission to ASEAN, 2020). Selain itu, pemerintah AS mengutus DTRA untuk menyediakan APD, pelatihan dan bahan-bahan laboratorium. Terakhir di Thailand, AS menganggarkan 1,2 juta dolar untuk penyediaan laboratorium.

4.2. Lemahnya Administrasi Trump Terhadap Multilateralisme dan Dampaknya Terhadap Sinergitas Penyelesaian Masalah Pandemi COVID-19

Pandemi COVID-19 adalah seruan untuk multilateralisme. Hal ini didasarkan bahwa semua negara memiliki masalah yang sama. Akan tetapi, negara melakukan tindakan yang sebaliknya seperti menutup batas tetapi virus bukan sesuatu yang mampu dibatasi (UN, 2020). Persebarannya

membuat tiap negara memiliki masalah dan penyelesaian yang sama pula. Selain itu, kondisi Covid-19 memaksakan negara-negara untuk mengintensifkan kerja sama karena akan tercipta saling ketergantungan perdagangan dan kondisi atas kerentanan timbal balik yang dihasilkan oleh virus tersebut. Negara juga dihadapkan pada kesulitan untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Sulit rasanya hanya mengandalkan produksi dalam negeri, terutama bagi negara yang memiliki jumlah korban yang banyak dengan layanan kesehatan yang minim. Pasokan rantai terintegrasi secara global menandakan bahwa negara-negara akan bergantung pada impor untuk pasokan medis, masker, obat-obatan dan alat kesehatan pengunjung (Busby, 2020). Lagi-lagi, beberapa negara tidak memiliki sarana yang cukup untuk mengatasinya. Menurut Keohane dan Nye menyatakan bahwa apabila aktor bekerja sama, maka situasi yang paling memungkinkan adalah harmoni (Busby, 2020). Dalam hal ini, penulis mengartikan harmoni sebagai kemampuan negara untuk bisa lepas dari pandemik COVID-19.

Kerja sama harus dilakukan karena kondisi tidak ideal yang dialami suatu negara pada akhirnya akan berdampak kepada negara lain. Seperti contoh, kerja sama di bidang ekonomi antara negara-negara atau negara-organisasi internasional sangat tergantung oleh aktivitas ekonomi pada masing-masing aktor. Bukti bahwa pandemik COVID-19 mampu menghancurkan ekonomi sebuah negara pada akhirnya membuat kerja sama ekonomi akan terhambat pula. Oleh karena itu, kerja sama harus diarahkan untuk memenuhi tantangan medis, politik dan ekonomi yang paling cepat untuk menangani pandemi (Buss & Tobar, 2020). Selain itu, upaya kerja sama internasional harus diarahkan pada pemastian pendanaan yang cukup untuk mengatasi pandemi, termasuk penguatan sistem kesehatan secara global. Distribusi yang adil menjadi kunci yaitu penyediaan secara universal bentuk pengobatan dan vaksin (Buss & Tobar, 2020).

Tetapi, masalah utama pada kerja sama internasional adalah terjadinya penurunan aktor hegemonik. Dengan meningkatnya multi polaritas di arena ekonomi, maka hegemon bisa saja mengurangi atau tidak mampu menyediakan public goods. Menurut Busby (2020), AS di masa administrasi Trump tidak memiliki minat untuk menunjukkan kepemimpinannya dalam pandemi COVID-19. Namun demikian, AS dihadapkan pada kontestasi geopolitik yang cukup besar apabila berkaca pada semangat kepemimpinan yang dilakukan oleh China dalam pandemik COVID-19. Berbagai berita dan tulisan menyatakan bahwa China telah mengambil peran yang cukup sentral dengan menawarkan sumbangan dan bantuan kepada negara-negara yang sedang berjuang memerangi wabah COVID-19. Akan tetapi hingga saat ini, masih belum terlihat gerak AS untuk mampu mengimbangi kepemimpinan yang dilakukan oleh China. Bahkan dalam pemerintahan Trump, negara tersebut terlihat lebih sibuk membangun narasi pertentangan terhadap peran China dalam COVID-19 dibandingkan berkontribusi dalam pemenuhan kebutuhan kesehatan global. Selain itu, upaya AS dengan gaya isolasionisnya terlihat saat memberikan pernyataan yang meyakinkan bahwa ilmuwan-ilmuwan Jerman untuk pindah dan memberikan vaksin secara eksklusif ke Amerika Serikat. Kondisi ini menjadi pertanyaan bagi masyarakat internasional terkait makin menjauhnya AS dari upaya kerja sama internasional dalam melawan pandemik COVID-19 (Fuchs, 2020).

Dalam tradisinya, AS seharusnya mampu untuk mendorong kepemimpinan global untuk mengatasi berbagai krisis seperti kesehatan, kelaparan, hingga bencana alam. Tetapi pada masa administrasi Trump, AS tidak memperlihatkan kepemimpinan tersebut. Kegagalan administrasi Trump tersebut terlihat dengan kondisi kritis yang dialami domestik. Selain kenaikan angka positif dan kematian yang cukup pesat, pemerintah pusat terkesan untuk memberikan tanggung jawab penanganan pandemi kepada gubernur di negara-negara bagian AS. New York sebagai wilayah yang terdampak parah pandemik COVID-19 adalah contoh jelas dimana Trump menolak untuk

memberikan tambahan pasokan medis dan ventilator. Untuk memenuhi kebutuhan di negara bagian tersebut, Pemerintah New York harus bekerja sama dengan China untuk memenuhi kebutuhan 1.000 ventilator (Business Insider SG, 2020).

Dalam forum multilateral, partisipasi AS tidak terlihat menonjol, bahkan dianggap menghancurkan kepercayaan organisasi multilateral kesehatan seperti World Health Organization (WHO). Pada bulan April 2020, Trump mengancam untuk memutus anggaran kepada organisasi kesehatan milik PBB tersebut. Padahal, AS memiliki peran yang cukup signifikan dalam berjalannya aktivitas WHO dengan menyumbangkan 15% dari total anggaran yang dibutuhkan oleh WHO tiap tahunnya (Business Insider SG, 2020). Alasan utama Trump memotong anggaran kepada WHO karena sikap organisasi tersebut yang terlalu berpihak kepada China. Pemotongan anggaran tersebut diprediksi akan berdampak pada visi WHO dalam menangani pandemi COVID-19 seperti penelitian vaksin, kurangnya penyedia konsultasi kesehatan di tiap negara, sehingga berdampak pada tata kelola kesehatan global yang rapuh.

Sedangkan ASEAN berusaha untuk membangun upaya regional dengan menciptakan The Declaration of the Special ASEAN Summit on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Deklarasi tersebut merupakan capaian penting bagaimana organisasi kawasan berusaha untuk membangun wacana kerja sama yang penting dan panduan pengendalian pandemik bagi negara-negara anggota (ASEAN, 2020a). ASEAN sangat bergantung pada upaya kolaboratif antar negara dan kerja sama dengan negara-negara besar karena seluruh anggota memiliki masalah masing-masing dalam menangani pandemik. Selain itu karena pandemik COVID-19 adalah bentuk dari keamanan non-tradisional, upaya kerja sama dengan negara mitra seharusnya bisa dilakukan. Berbagai forum-forum seperti ASEAN +3 maupun EAS kemungkinan mampu menjadi wadah penting bagi ASEAN dan negara mitra untuk bekerja sama. Kemungkinan kerja sama dengan Jepang, Korea Selatan dan China sangat mungkin bisa terjadi karena kepemimpinan negara-negara tersebut juga mendorong hal yang sama, bahwa kondisi pandemik dapat diselesaikan dengan bentuk kerja sama internasional. Tetapi hal sebaliknya tidak terjadi di Amerika Serikat. Dari pemaparan kondisi AS sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa upaya kerja sama internasional akan terasa sulit. Watak inward looking dan acuhnya administrasi Trump terhadap kondisi negara lain membuat wacana kerja sama tidak akan terlalu bersifat konkret.

Apabila berkaca pada dokumen Joint Statement Special Video Conference Of Health Ministers Of ASEAN And The United States In Enhancing Cooperation. Wacana kerja sama AS-ASEAN sangat terbatas pada keinginan dan kondisi domestik AS. Seperti contoh, upaya bantuan APD, ventilator dan obat-obatan sangat tergantung dengan kebutuhan domestik AS. Menurut analisis dari poin kerja sama tersebut, mayoritas poin yang telah ditetapkan tidak akan terlaksana apabila kebutuhan domestik AS belum terpenuhi. Selain itu, kerja sama hanya berkisar pada bentuk "lunak" sebuah bantuan seperti kerja sama teknis, pengiriman ahli medis, dan sosialisasi dampak pandemik ke masyarakat. Sebagai sebuah negara besar, AS telah tertinggal jauh dari negara besar lainnya yang membangun komitmen kerja sama yang lebih konkret dengan ASEAN. Seperti contoh, motif kerja sama penanganan COVID-19 diperlihatkan oleh China, Jepang, dan Korea Selatan dengan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN Plus Three pada Bulan April 2020. Selain komitmen normatif, ketiga negara tersebut juga memberikan banyak kebutuhan medis yang diperlukan bagi pahlawan medis yang tersebar di negara anggota ASEAN. Selain itu, negara-negara

tersebut juga membentuk kerangka kerja sama pendanaan dengan menciptakan ASEAN Respond Fund (Jakarta Post, 2020).

4.2. Kerja Sama ASEAN-AS dalam Penanggulangan Pandemik COVID-19 di Masa Administrasi Trump: Sebuah Refleksi

Retorika anti-globalisasi Trump tetap akan mempengaruhi berbagai kerja sama AS dan organisasi internasional maupun regional. Kalkulasi potensi kerja sama akan sangat bergantung terhadap persepsi Trump dalam melihat keuntungan dari kerja sama dan pemenuhan kebutuhan domestik. Pemerintahan Trump juga merupakan neraka bagi masa depan multilateralisme (Linn, 2018, p.99; Perwita & Razak, 2020). Dalam pidato dalam Sidang Majelis Umum PBB pada September 2019, Trump telah menekankan bahwa AS dimasa administrasinya tidak akan membawa ide-ide globalisme dan lebih menekankan pada patriotisme. Upaya Trump untuk membangun relasi antar negara atau organisasi regional akan didasarkan pada bentuk *transactional bilateralism,* dalam hal ini, upaya kerja sama yang diarahkan harus berakhir pada kepentingan domestik AS itu sendiri (Stokes, 2018). Seperti contoh, AS tetap berkomitmen untuk memperkuat perannya di Eropa dengan mendanai secara maksimal *European Deterrence Initiative* (EDI). EDI adalah sebuah program pertahanan dan kepentingan AS di Eropa pasca wilayah Krimea kembali ke dalam wilayah kedaulatan Rusia.

Akan tetapi, orientasi kerja sama AS di bidang selain militer terjadi sebaliknya. Hubungan ekonomi dan sosial budaya yang dibangun AS memperlihatkan diskontinuitas yang luar biasa. Trump dianggap membangun perlawanan terhadap prinsip-prinsip utama Liberal International Order (LIO) (Stokes, 2018). Seperti contoh, AS berusaha untuk menegosiasikan ulang NAFTA, keluar dari Kesepakatan Iklim Paris, hingga berselisih dengan misi organisasi G7. Definisi *transactional* bilateralism menurut Stokes (2018) adalah upaya Trump untuk menolak kebijakan luar negeri *transformasional* yang didorong oleh cita-cita seperti HAM dan demokrasi, sekaligus sangat skeptis dalam melihat rezim yang dianggap membebani atau membatasi kebebasan pemerintah AS. Oleh karena itu, Trump mencoba untuk mengkalibrasi ulang ambisi Amerika dalam setiap kerja sama internasional. AS akan mengkalkulasikan setiap hubungan yang dibangun dan melihat bagaimana keuntungan yang didapatkan dari kerja sama tersebut. Pertanyaan utamanya, apakah AS mendapatkan keuntungan dari kerja sama penanganan COVID-19 dengan ASEAN?

Motif Trump untuk menyelenggarakan KTT Khusus AS-ASEAN pada Februari 2020 memperlihatkan bahwa AS sedang menguatkan posisinya bahwa AS tidak kehilangan kepentingan di kawasan ASEAN. Visi utama yang dibawa AS adalah Free Open Indo Pacific (FOIP) (Parameswaran, 2019). Selain itu, AS dihadapkan pada posisi yang cukup sulit di mana salah satu negara ASEAN, Kamboja membangun hubungan yang cukup erat terhadap China setelah Angkatan Laut China membangun pos militer di wilayah teritorial Kamboja (Parameswaran, 2019). Menurut penulis, AS harus memberikan peran yang cukup besar untuk menandingi pengaruh China di kawasan ASEAN, salah satunya adalah dengan membangun komitmen yang kuat terhadap penanggulangan COVID-19 di ASEAN. Akan tetap, upaya kerja sama tetap terhalang oleh dua hal. Pertama, bagaimana pemerintah Trump mampu mengatasi masalah pandemik COVID-19 domestik yang cukup besar dan telah memakan banyak korban. Dengan orientasi American First, penulis melihat Trump tidak mengambil pengaruh yang cukup besar dalam kepemimpinan global COVID-19. Karena pada dasarnya, kegagalan Trump dalam mengatasi pandemi COVID-19 di negaranya akan berdampak pada kontestasi pemilu yang akan Trump hadapi, dimana Trump kalah pada akhirnya oleh Presiden AS kini, Joe Biden. Kedua, sikap skeptis Trump terhadap kerja sama

internasional telah menyulitkan upaya ideal dalam pembangunan kerja sama dengan ASEAN. Kalkulasi rasional Trump terhadap bentuk kerja sama menghambat misi kemanusiaan yang terus diagungkan dalam interaksi antar aktor internasional dalam menangani COVID-19.

5. Kesimpulan

Kerja sama ASEAN-AS menurut penulis akan mengalami hambatan yang cukup besar, terutama dalam masa administrasi Presiden Trump. Orientasi *inward looking* dan visi anti-globalisasi membuat setiap kerja sama multilateral maupun bilateral yang dilakukan dengan tidak maksimal. Bentuk *transactional bilateralism* yang dilakukan oleh Amerika Serikat dalam kerja sama pandemik COVID-19 tidak sesuai dengan misi kemanusiaan yang sangat diutamakan dalam kerja sama tersebut. Selain itu dari berbagai literatur yang telah penulis baca, AS diprediksi tidak akan mengambil peran kepemimpinan dalam kerja sama pengendalian pandemik COVID-19. Akan tetapi, upaya kerja sama AS-ASEAN akan sangat bergantung terhadap perspektif administrasi Trump dalam melihat mitra utama ASEAN yang telah membangun kerja sama konkret dalam penanggulangan COVID-19, terutama China. Upaya China yang berusaha untuk membangun citra positif dalam penanggulangan COVID-19 di ASEAN akan memancing AS untuk bergerak. Sebagai wilayah yang dianggap strategis, sulit bagi AS untuk tidak membangun kepedulian terhadap kerja sama penanggulangan COVID-19 di ASEAN.

REFERENSI

Buku dan Jurnal:

Busby, J. (2020). What International Relations Tells Us about COVID-19. Diakses dari: https://www.e-ir.info/2020/04/26/what-international-relations-tells-us-about-covid-19/

Buss, P & Tobar, S. (2020). COVID-19 And Oportunities For International Cooperation. Diakses dari: https://fiocruz.tghn.org/articles/covid-19-and-oportunities-international-cooperation/

Chong, A., & Kliem, F. (2020). EU and ASEAN: In Common Disunity. Analysis. Eurasia Review. https://advance.lexis.com/document/?pdmfid=1516831&crid=f7de5fd3-d450-4e8f ab6b-30003c67f091&pddocfullpath=%2Fshared%2Fdocument%2Fnews% 16

Chong, T. T. L., Li, X., & Yip, C. (2021). The impact of COVID-19 on ASEAN. Economic and Political Studies, 9(2), 166–185. https://doi.org/10.1080/20954816.2020.1839166

Floristella, A.P. (2019). United States and European Union Evolving Approaches in Southeast Asia: Moving Closer to Convergence or Divergence? dalam Journal of Current Southeast Asian Affairs 1–22. DOI: 10.1177/1868103419866533

Hendrawan, A., Atmojo, B. T., & Pratama, W. R. (2020). Demokrasi Brazil: Bagaimana Brazil Melewati Fase Transisi dan Membangun Konsolidasi Demokrasi? Insignia Journal of International Relations, 7(2), 122–137.

Ibrahim, A. A. (2020). The Future Of International Relations Post COVID -19 Pandemic. Diakses dari: https://www.researchgate.net/publication/340376660_The_future_of_international_relations_post_COVID_-19_pandemic/link/5e8592c3a6fdcca789e8e9eb/download

Linn, Johannes. (2018). Recent Threats to Multilateralism dalam Global Journal of Emerging Market Economies 9(1–3) 86–113. DOI: 10.1177/0972063417747765

Permal, S. (2021). Cascading effect of COVID-19: de-globalisation and its impact on global governance. Australian Journal of Maritime and Ocean Affairs.

https://doi.org/10.1080/18366503.2021.1962080
Rachmat, A. N. (2020). Identitas Kolektif pada Kerja Sama Kontra-Terorisme dalam Kerangka ASEAN Political-Security Community. Insignia Journal of International Relations, 7(2), 174–187
Ramasamy, H., & He, W. (2020). Coping with COVID-19 the ASEAN Way Analysis. Eurasia Review, https://www.eurasiareview.com/11072020-coping-with-covid-19-the- asean-way-analysis/
Rüland, J. (2021). Covid-19 and ASEAN: Strengthening State-centrism, Eroding Inclusiveness, Testing Cohesion. International Spectator, 56(2), 72–92. https://doi.org/10.1080/03932729.2021.1893058
Sachs, J. D. (2020). Perspective: COVID-19 and Multilateralism. Consilience: The Journal of Sustainable Development, 22, 1–5. https://doi.org/10.2307/26924956
Stokes, D. (2018). Trump, American hegemony and the future of the liberal international order dalam International Affairs 94: 1 (2018) 133–150; doi: 10.1093/ia/iix238
Olson, M. (1971). The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups. Massachusetts: Harvard University Press
Ortega, F., & Orsini, M. (2020). Governing COVID-19 without government in Brazil: Ignorance, neoliberal authoritarianism, and the collapse of public health leadership. Global Public Health, 1257–1277. https://doi.org/10.1080/17441692.2020.1795223
Severino, R. C. (2006), Southeast Asia In Search of an ASEAN Community: Insights from the Former ASEAN Secretary General, Singapore: Institute of Southeast Asian Studies

Dokumen:

ASEAN. (2007). Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN Charter). Diakses dari: https://www.asean.org/wp-content/uploads/images/archive/AC-Indonesia.pdf
ASEAN. (2020a). Declaration of the Special ASEAN Summit on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Diakses dari: https://asean.org/storage/2020/04/FINAL-Declaration-of-the-Special-ASEAN-Summit-on-COVID-19.pdf
ASEAN. (2020b). Economic Impact of COVID-19 Outbreak on ASEAN. Diakses dari: https://asean.org/storage/2020/04/ASEAN-Policy-Brief-April-2020_FINAL.pdf
ASEAN. (2020c). Joint Statement Special Video Conference Of Health Ministers Of Asean And The United States In Enhancing Cooperation On Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) RESPONSE. Diakses dari: https://asean.org/storage/2020/05/Adopted_ASEAN-US-Joint-Statement-on-COVID-19.pdf

Internet:

ASEAN. (2020d). China Donates Medical Supplies To ASEAN Secretariat For COVID-19 Prevention. Diakses dari: https://asean.org/china-donates-medical-supplies-asean-secretariat-covid-19-prevention/
Business Insider. (2020). The US Is 'Not A Global Power' Thanks To Trump's Disastrous Coronavirus Response As China Fills The Void, Former US Officials Warn. Diakses dari: https://www.businessinsider.sg/trump-chaotic-coronavirus-response-has-created-void-china-is-filling-2020-4?r=US&IR=T
Business Insider. (2020). Trump's Plans To Cut WHO Funding Amid The Coronavirus Could Exacerbate The Crisis And Cost More American Lives. Diakses dari: https://www.businessinsider.sg/trump-cutting-who-funding-amid-coronavirus-could-cost-american-lives-2020-4?_ga=2.66636142.1985428551.1589728154-2096415529.1587832999&r=US&IR=T
Forbes. (2020). Health Secretary Asks For Emergency Coronavirus Funding While Trump Calls For 16% Cut To CDC Budget. Diakses dari: https://www.forbes.com/sites/lisettevoytko/2020/02/26/health-secretary-asks-for-emergency-

coronavirus-funding-while-trump-calls-for-16-cut-to-cdc-budget/#55c8e59d57f3

Fuchs, M. (2020). Trump Is Making America An Obstacle In The Global Fight Against Covid-19. Diakses dari: https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/may/12/trump-is-making-america-an-obstacle-in-the-global-fight-against-covid-19

Jakarta Post. (2020). EU Donates €350 Million To Help ASEAN Countries Battle COVID-19. Diakses dari: https://www.thejakartapost.com/news/2020/04/28/eu-donates-350-million-to-help-asean-countries-battle-covid-19.html

Jakarta Post. (2020). Leaders Support Establishment Of ASEAN COVID-19 Response Fund. Diakses dari: https://www.thejakartapost.com/seasia/2020/04/14/leaders-support-establishment-of-asean-covid-19-response-fund.html

Manning, A. (2019). Trump's Globalism Is a Caricature of Multilateralism. Diakses dari: https://foreignpolicy.com/2019/10/02/trumps-globalism-is-a-caricature-of-multilateralism/

Parameswaran, P. (2019). Assessing the New US Free and Open Indo-Pacific Progress Report. Diakses dari: https://thediplomat.com/2019/11/assessing-the-new-free-and-open-indo-pacific-progress-report/

_____. (2019). Trump and Southeast Asia: What Would a US-ASEAN Special Summit Do?. Diakses dari: https://thediplomat.com/2019/11/trump-and-southeast-asia-what-would-a-us-asean-special-summit-do/

_____. (2019). Why a New China Naval Outpost in Cambodia Would Matter. Diakses dari: https://thediplomat.com/2019/07/why-a-new-china-naval-outpost-in-cambodia-would-matter/

Stiglitz, J. (2019). Evaluating the US Policy Response to COVID-19 dalam WEBINAR: Pandemic With Relief. Diakses dari: https://www.ineteconomics.org/events/priorities-for-pandemic-relief-efforts

The Guardian. (2020). US underprepared for coronavirus due to Trump cuts, say health experts. Diakses dari: https://www.theguardian.com/world/2020/jan/31/us-coronavirus-budget-cuts-trump-underprepared

UN. (2020). UN/DESA Policy Brief #62: The COVID-19 pandemic: a wake-up call for better cooperation at the science–policy–society interface. Diakses dari: https://www.un.org/development/desa/dpad/publication/un-desa-policy-brief-62-the-covid-19-pandemic-a-wake-up-call-for-better-cooperation-at-the-science-policy-society-interface/

US Mission to ASEAN. History of the U.S. and ASEAN relations. Diakses dari: https://asean.usmission.gov/our-relationship/policy-history/usasean/

Worldometer. (2020). United States Coronavirus Cases. Diakses dari: https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/

https://doi.org/10.30656/jhak.v2i1.10486
EISSN: 3021-7628